

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa)**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh:

**SYAMSIDAR
NIM : 10100112020**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsidar

Nim : 10100112020

Tempat/tgl.Lahir : Bontobila, 13 Juni 1994

Jur/prodi : Peradilan Agama

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Samata

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Agustus 2016

Penyusun

SYAMSIDAR
NIM:10100112020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)", yang disusun oleh Syamsidar, NIM: 10100112020, mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 September 2016 M.
13 Dzulhijjah 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IIA Sungguminasa)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. yang sangat berjasa membawa ummat ke jalan Dienul Islam. Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam semesta, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penebus kejahatan gelap gulita sehingga atas dasar cinta kepada beliauah penulis mendapat motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan sehingga dapat bermamfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada kedua orang tuaku yang sangat saya hormati dan cintai, Bapak Maliang dan Ibunda tercinta dan tersayang Sattuma, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga hingga berjuang dalam menafkahi

kebutuhanku. Harapan serta doa beliaulah hingga saat ini penulis mampu untuk melewati masa-masa sulit selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Dan untuk saudaraku terkasih dan tersayang Rahmatullah serta Keluarga besarku, terima kasih penulis haturkan karena telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, motivasi serta memberi dukungan, baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik. dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang memberikan kesempatan mengecap getirnya kehidupan kampus UIN, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akedimisi.
2. Ayahanda Prof. Dr. Darusalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. serta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Supardin, M.Hi. beserta ibu Dr. Hj.Fatimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Zulfahmi Alwi, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D. selaku pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah dan skripsi ini.
6. Segenap Dosen-dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah mendidik, membimbing, mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermamfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Aamiin.

7. Bapak/Ibu Pengadilan Agama Sungguminasa serta jajarannya yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Serta seluruh teman-teman Peradilan Agama angkatan 2012 yang sedikit banyaknya memberikan ide dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berkembang, khususnya kepada senior peradilan agama Nur Asiah SH.I angkatan 2010, sahabat-sahabatku Hasnah, Nur khaerati samad, Haerani, Sri Irnawati, Ririn Angreani, A. Absarita, Dita Mardiah Novita, dan Hardianti Haeba, juga tak lupa kepada teman-teman KKNP-VI khususnya posko 4 Pappareang yang saya cintai dan banggakan berkat dukungan penuh dan menjadi inspirator serta inisiator penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula halnya dengan skripsi yang penyusun susun ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah swt. Memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, Amin.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata, 25 Agustus 2016
Penyusun

SYAMSIDAR
NIM: 10100112020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN	13-29
A. Pengertian Perceraian.....	13
B. Dasar Hukum Perceraian.....	14
C. Jenis-Jenis dan Alasan Perceraian.....	15
D. Akibat dan Hikmah Perceraian	20
E. Pengertian Impoten	26
F. Sebab-Sebab Impoten.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30-32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30

C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA).....	33-72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten	40
C. Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten	48
D. Duduk Perkara Tentang Impoten	52
E. Analisis Pertimbangan dan Alasan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa...	64
BAB V PENUTUP	73-75
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76-77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ḍammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathāh dan yā	ai	a dan i
اَوْ	fathāh dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَيَّ... / اَ....	Fathāh dan alif atau yā	ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan yā	ī	i dan garis di atas

و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’ān (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ABSTRAK

Nama : Syamsidar

NIM : 10100112020

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian akibat suami impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa ? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat suami impoten ?, 2) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perceraian akibat suami impoten ?, dan 3) Bagaimana pertimbangan dan alasan hakim terhadap perceraian akibat suami impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

Jenis Penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : Pendekatan yuridis dan syar'i dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, dokumentasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah bathin (impoten) adalah suatu kebolehan (mubah) oleh syariat. Kebolehan tersebut berdasarkan atas pengkompromian atas nilai ataupun konsep kebolehan, Sebagaimana hakim dalam putusannya merujuk pada kitab Sirojul Wahaj halaman 362, hal tersebut dibolehkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Serta berdasarkan pendapat para mazhab apabila suami berpenyakit impoten dan keimpotenannya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan sebagai suami isteri serta menimbulkan penderitaan bagi isterinya. maka hakim dapat menceraikan keduanya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri,

maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Hal ini didasari pada pasal 34 poin 3 yaitu: “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Pertimbangan hukum hakim tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI dan kitab Sirojul Wahajab hal 362. Dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah yang tiada lain memberikan putusan yang mencegah terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan oleh seorang isteri.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) yang menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam Agama Islam, sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Nur/24: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunianya.²

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 494

Setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan perkawinan tersebut, tetapi pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang perkawinan bagi warga negaranya, hal ini tercermin dari arti perkawinan tersebut yang tercantum dalam bab II pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Setiap manusia mendambakan pernikahan yang bahagia, dengan mewujudkan cita-cita sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena banyak pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian (talak).

³Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Cet 37, h.537

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 114

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dan rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.

Tetapi banyak juga diantara mereka tujuan pernikahan itu tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah karena faktor ketidakcocokan atau faktor lain seperti tidak mempunyai keturunan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berfikir jernih apakah keturunan atau anak mempunyai peranan penting dari arti pernikahan tersebut. Karena bila kita meninjau kembali dari tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut banyak sekali tujuannya seperti: memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasannya tidak masuk akal, maka perceraian yang demikian adalah telah mengkhufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan telah berlaku jahat kepada isterinya. Oleh karena itu perceraian (talak) sangat dibenci oleh Allah swt.

Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah swt. Perceraian (Thalaq) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan, namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), karena dengan perceraian berarti tujuan perkawinan menjadi pudar dan tidak tercapai.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).⁵

Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan isteri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun isteri mendelegasikan juru damai (hakam). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga menyelesaikan pertengkaran suami isteri agar keutuhan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.

Kasus-kasus perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu di lakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai thalaq atau inisiatif isteri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 di bab XVI bagian kedua tentang putusnya perkawinan.

Cerai gugat secara khusus diatur dari pasal 132 ayat 1 yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁶

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 73

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 144

Sampai dengan pasal 148 ayat 1 yang berbunyi :

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.⁷

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VIII pasal 39 ayat 2 yang berbunyi : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dalam KHI bab XVI bagian pertama pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 148

- f. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2)
- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan diatas di antaranya ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri (impoten) sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur akibat suami impoten adalah salah satu penyebab ketidakharmonisannya rumah tangga, bahkan kemampuan seksual suami memegang peranan penting dalam usaha menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Impoten adalah cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah agar suami isteri menyalurkan hasrat seksualnya secara sah tetapi banyak orang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian jelas bahwa yang dikatakan impoten dalam uraian diatas menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah syara' adalah orang yang tiak sanggup bersenggama pada kemaluan isterinya.⁸

⁸Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), h. 300

Tetapi dalam hal cacat itu terjadi setelah akad nikah, ulama berbeda pendapat, Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa jika cacat itu misalnya impotensi terjadi setelah pernah melakukan senggama hanya satu kali, maka cacat itu tidak lagi sah dijadikan alasan untuk bercerai. menurut pendapat ini, dengan senggama satu kali secara hukum berarti suami telah membayarkan kewajibannya kepada isterinya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa jika salah satu dari suami isteri mengalami adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi ia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, maka dikemudian hari ia tidak lagi berhak untuk menuntut cerai disebabkan cacat itu.⁹

Karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat besar, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap terjadinya perceraian karena suami impoten.

Perkara perceraian dengan alasan karena suami impoten pada Pengadilan Agama KLS II A Sungguminasa, yang setiap tahunnya mengalami pasang surut. Dari data rekap perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, terhitung mulai tahun 2013 mencapai 25 perkara, tahun 2014 kembali mengalami penurunan yaitu hanya 19 perkara, kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 27 perkara.¹⁰

⁹Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137

¹⁰“Rekap Perkara diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Situs Resmi PA Sungguminasa. <http://www.pa-sungguminasa.net/> Kamis, (7 Januari 2016).

Sebagai gambaran awal penulis melampirkan salah satu perkara yang telah di putus pada Pengadilan Agama KLS II A Sungguminasa, yaitu perkara dengan Nomor 91/Pdt.G/2011/PA/Sgm.

SW binti MB umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

AR bin RN umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Dusun F, Desa G, Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut tergugat. Sedangkan isi gugatan berupa tuntutan perceraian akibat tergugat impoten.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat banyaknya pengajuan perceraian karena alasan suami impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas IIA Sungguminasa)”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Identifikasi dan pembatasan masalah di sini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih menfokuskan Tinjauan Fiqih terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten di Pengadilan Agama Klas IIA Sungguminasa, dimana yang menjadi fokus utamanya ialah Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian akibat suami impoten di Pengadilan Agama Klas IIA Sungguminasa ditinjau dari

hukum Islam (pendapat-pendapat ulama) dan hukum positif. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. "*Fiqih*", berarti paham atau tahu. Sedangkan fiqih menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).¹¹
2. "*Hukum Islam*", Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al quran dan hadits, serta hukum syara'.¹²
3. "*Hukum positif*" Adalah Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu. *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu.¹³
4. "*Perceraian*", Perceraian, adalah sesuatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt.
5. "*Impoten*" Tidak ada daya untuk bersengama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) atau tidak berbuat apa-apa.¹⁴
6. "*Pengadilan Agama Sungguminasa*", lembaga pengadilan yang khusus menangani perkara bagi yang beragama Islam, yang berlokasi di Jl. Mesjid Raya No. 3 Sungguminasa.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Cet, I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 14.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 6.

¹³ H. Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam, di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 66.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 427.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan masalah berikut ini :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap perceraian akibat suami impoten ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif terhadap perceraian akibat suami impoten ?
3. Bagaimana Pertimbangan dan alasan hakim terhadap perceraian akibat suami impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya :

1. Menyikapi Tingkah Laku Suami, oleh Muhammad Abdul Ghoffar : Buku ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami mengalami impoten serta bagaimana kiat seorang istri dalam menyikapi suami yang mengalami impoten. Sedangkan dalam tulisan ini, penulis tidak hanya menguraikan faktor penyebab suami mengalami impoten tetapi juga menguraikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap seorang suami yang mengalami impoten.¹⁵
2. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA : Buku ini lebih fokus menguraikan tentang cacat yang

¹⁵Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 300

mungkin di alami oleh suami atau istri salah satunya yaitu suami yang impoten. Sedangkan dalam tulisan ini, penulis tidak hanya menguraikan cacat yang di alami oleh suami yang impoten tetapi juga menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada seorang suami yang impoten.¹⁶

3. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, oleh M. Yahya Harahap, S.H : Buku ini menguraikan tentang bagaimana tata cara pemeriksaan atas perkara cacat badan sedangkan dalam tulisan ini lebih khusus membahas tentang bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian akibat suami mengalami impoten pada lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut.¹⁷
4. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2007/PA.JS yang telah di putus setelah melalui berbagai proses pemeriksaan. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menggunakan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama KLS IIA Sungguminasa.

Sejauh pengamatan penulis judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun dalam bentuk tesis atau disertasi. Namun, tulisan yang menyinggung judul ini pernah di tulis oleh DENI RAMADHANI dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Percerian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan”. Di mana dalam tulisannya ini ia hanya fokus terhadap penyelesaian perkara dengan alasan karena tidak mempunyai keturunan semata. Sedangkan dalam tulisan ini

¹⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 129

¹⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241

penulis memfokuskan terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami impoten.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

- a) Untuk Memahami bagaimana Hukum Islam mengatur perceraian dengan alasan suami impoten.
- b) Untuk Memahami bagaimana Hukum Positif mengatur perceraian dengan alasan suami impoten.
- c) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan suami impoten di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagi penulis

Untuk mengembangkan disiplin ilmu yang di peroleh selama masa perkuliahan dan untuk mengetahui lebih komprehensif khususnya pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- b) Bagi dunia ilmu pengetahuan

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memperbanyak khazanah keilmuan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN

A. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, tidak bersatu lagi sebagai suami isteri).¹

Perceraian dalam bahasa arab adalah talak, kata thalaq berasal dari kata ithlak (الطَّلَاق) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Apabila pergaulan kedua suami isteri tidak mencapai tujuan pernikahan, yang mengakibatkan berpisahnya dua keluarga, karena tidak ada kesepakatan antara suami dan isteri, maka dengan keadilan Allah swt. Dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran yakni pintu perceraian. Dengan adanya pintu talak, terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua pihak dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok dan dapat mencapai apa yang dicita-citakan.²

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI bagian kesatu pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 163

²Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.148

sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak ada lagi halal bagi suami atas isterinya. Tetapi ada perbedaan para ulama mendefinisikan perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi hal ini berbeda jika kita melihat di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilangsungkan hanya pada pengadilan agama.

Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara indonesia yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan ia melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraian itu tidak sah demi hukum atau batal demi hukum.

B. Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau Hadits, seperti:

- 1) QS Al-Baqarah/2:232 yang berbunyi:

³R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 549

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^٤ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^٥ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴

2) QS Ath-Thalaaq/65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ^٥ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ^١

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.⁵

C. Jenis-Jenis dan Alasan-Alasan Percerian

1. Jenis-jenis Perceraian

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 46

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 816

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami dan isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

b. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu:

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, hal itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. Yaitu:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).⁶

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 73

menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

c. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Sunnah

Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah swt. Yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

e. Mahzur (terlarang)

Talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid, atau isteri dalam keadaan suci tanpa dicampuri pada waktu suci tersebut, para ulama mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah.⁷

Sedangkan dilihat dari dibolehkannya sang suami untuk kembali kepada isterinya, adalah:

- 1) *Talak raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- 2) *Talak bain*, adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru.

⁷Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke 5, h. 208

Talak bain ini terbagi menjadi dua macam:

- 1) *Talak bain sugra'* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba'in sugra sebagaimana dimaksud pada pasal 119 KHI ayat (1) adalah
 - a. Talak yang terjadi qabla al-dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu';
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁸
- 2) Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.⁹

2. Alasan-alasan Perceraian

Yang dimaksud dengan alasan perceraian disini adalah suatu kondisi dimana suami isteri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka.

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan, sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Bab VIII pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di Dalam Peraturan

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 75

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 220

Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada Bab VIII Pasal 39 ayat 2 sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI bagian kesatu Pasal 116 menjelaskan hal tambahan dua point dalam penyempurnaan yaitu, perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat Salah satu pihak melakukan kejahatan yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
- e. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2.
- f. Suami melanggar taklik talaq.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

D. Akibat Perceraian dan Hikmah Perceraian

1. Akibat Perceraian

Apabila perkawinan yang di harapkan tidak tercapai dan perceraian yang diambil sebagai jalan keluarnya maka akan timbul akibat dari perceraian itu sendiri. Akibat perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri. Dalam hal ini baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut pada Pasal-Pasal berikut ini, yaitu :

1) Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2) Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Keharuasan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

Dalam kewajiban memberi mut'ah itu wajib menurut Ibnu Hazmin, dasar wajibnya itu adalah firman Allah swt. Dalam QS Al-Baqarah/2:241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak isterinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan sebagaimana dijelaskan firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2: 236 yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan¹¹

Jumhur berpendapat bahwa mut'ah itu hanya untuk perceraian yang insiatifnya berasal dari suami, seperti *talak* kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 49

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 48

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla al Dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- e. Dalam pasal 50 dinyatakan, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada isterinya yang masih dalam masa iddah
- f. Dalam pasal 51 dinyatakan, bekas isteri dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tak menikah dengan pria lain.
- g. Dalam pasal 152 dinyatakan, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.
- h. Dalam pasal 156 dinyatakan, akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :
 - a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibunya;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 7. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- b. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - c. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersenut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹²

2. Hikmah Perceraian

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 201.

Dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita dapatkan baik bagi sang suami atau sang isteri. Talak paa dasarnya sesuatu yang halal tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah swt. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, baik itu suami atau isteri bahkan kepada anak itu sendiri.

Allah yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungknan terjadinya talak.

1. Kemadulan, apabila seorang laki-laki mandul maka ia tidak akan mempunyai keturunan padahal anak adalah bagian utama dari perkawinan. Dengan anak atau keturunan, maka dunia akan lebih berwarna begitu pula dengan wanita mandul maka ia tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sehingga apabila salah satu pasangan mandul, maka perceraian dapat dijadikan solusi akhir, sebab diantara tujuan yang didorong untuk melakukan perkawinan adalah abak atau keturunan. Sehingga disinilah hikmah adanya perceraian untuk mereka yang mandul, baik bagi laki-laki atau wanita.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Kahfi/18: 46 yang berbunyi :

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹³

2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta dan kasih sayang karena kalau cinta dan kasih sayang sudah hilang dari kehidupan rumah tangga maka perjalanan berumah tangga tidak akan lebih nyaman. Ketika terjadi pertengkaran, maka yang menjadi korban adalah anak mereka akan berada dalam bahaya kegoncangan akiat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar.

Selain hal itu, hikmah adanya perceraian akan menambahkan kita pada pembelajaran hidup bahwasanya dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani baik itu bersifat senang atau pun sedih. Karena semua ini sudah ada ketentuannya yang telah ditentukan oleh Allah swt. Sehingga diharapkan semua peristiwa yang kita alami dapat kita ambil hikmah atau sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu Allah swt.¹⁴

E. Pengertian Impoten

Kata Impoten ini lebih identik dengan perihail lemah syahwat, Impoten adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁵

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408

¹⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 401

¹⁵Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 300

Kata impoten berasal dari bahasa inggris yang berarti tidak berdaya, tidak bertenaga, mati pucuk (lemah syahwat) dan juga bisa disebut "*Inniin*" (yang tidak mampu bersetubuh).

Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.

Bagi seorang pria, impotensi merupakan momok menakutkan Bahkan kerap menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Ketika seorang pria sudah tidak mampu lagi ereksi, maka kehidupannya akan terasa tidak sempurna dan hampa. Ibnu abidin juga mengemukakan pendapatnya yang dikutip oleh Dra. Firdaweri di dalam bukunya tentang pengertian impotensi menurut bahasa dan istilah sebagai berikut: orang impoten menurut bahasa ialah orang yang tidak sanggup bersetubuh.

Dan (orang impoten) menurut syara' (istilah) ialah: orang yang tidak sanggup mensenggamai isterinya, karena terhalang si suami akibat impoten. Seperti sudah tua atau masih kecil.

Dan untuk lebih jelasnya Dra. Firdaweri mengutip pendapat Abdurahman Al-Jaziri yang mengemukakan pendapatnya tentang impotensi yang lebih memperinci lagi maksud impoten adalah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya pada kemaluannya, walaupun sudah bangun kemaluannya pada waktu mendekati isterinya, sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan wanita lain. Impoten bisa disebut juga orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup pada perempuan perawan, bisa disebut impoten juga karena orang yang sanggup dengan isterinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka

orang yang ditemui keadaannya seperti itu disebut dinamakan impoten untuk mensetubuhi isterinya. Dengan demikian impoten menurut bahasa ialah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah adalah orang yang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan isterinya.¹⁶

Kalau hal ini terdapat pada salah seorang suami tentu isteri kurang menerima haknya. Selama isteri merelakan itu tidak menjadi persoalan, tetapi bagi isteri yang tidak rela, ia akan menuntut haknya. Seorang isteri bisa mengadukannya kepada pengadilan agama setempat dan tidak sedikit dari isteri yang mengalami keadaan seperti ini akan berakhir pada perceraian. Dalam hal ini isteri harus melalui prosedur pengadilan.

F. *Sebab-Sebab Impotensi*

Dari segi penyebabnya, impotensi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Impoten Organik adalah impotensi yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang kemudian mempengaruhi alat kelamin, sehingga kemampuan seksualnya tidak normal. Penyakit yang dimaksud diatas yaitu mencakup trauma operasi yang menyebabkan sirkulasi darah ke zakat tidak baik, kerusakan sum sum tulang belakang (trauma medulla spinalis) pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau karena membengkaknya saraf-saraf karena difteria.

Impotensi juga bisa karena suami menderita penyakit TBC, Malaria, dan kencing manis. Pada prinsipnya kencing manis merupakan penyakit karena

¹⁶Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 91

gangguan metabolisme tubuh, yakni kegagalan mengurangi gula di dalam membuka peluang agar terjadinya komplikasi seperti gangguan pada pembuluh darah (vaskulopat), gangguan persarafan, dan gangguan pada sel otak. Padahal ketiga faktir tersebut memegang peranan penting dalam proses ereksi. Oleh karena itu, wajar jika impotensi sering menimpa pada penderita kencing manis.

- b. Impoten Fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, pemakaian obat-obatan antihipertensi, antidepresi, trankuilizer, obat diksi seperti alkohol. Barbiturat, heroin, amfetamin secara berlebihan. Sebagaiman diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secra otomatis. apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Disamping itu kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi jenis yang disebutkan diatas.
- c. Impoten Psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Laki-laki yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena gangguan yang bersifat psikis. Namun jika dibiarkan bisa menjadi impotensi selamanya.¹⁷
- d. Psikogen adalah impoten yang disebabkan oleh gangguan psikis dan emosional.¹⁸

¹⁷Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islam*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 110

¹⁸Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 302

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Klas II A. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta yang diselediki.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Khususnya pada Pengadilan Agama Sungguminasa Klas II A yang berlokasi di Jalan Mesjid Raya No. 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam kaitannya kasus perceraian akibat suami impoten di tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis, dimana pendekatan yuridis merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Data Primer ialah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan lainnya seperti jurnal, surat kabar, majalah dan lainnya.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi (*dokumentation*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti berkas pengajuan perceraian akibat suami impoten yang diajukan oleh penggugat beserta lampiran-lampiran persyaratannya dan putusan hakim itu sendiri.

¹ Cholid Norbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 8

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu hakim yang berada di Pengadilan Agama Sungguminasa Klas II A.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Maksud wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada 3 narasumber, dalam hal ini hakim-hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Klas II A. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II A SUNGGUMINASA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jenepono, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli

pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada

waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun :

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)

2. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir, (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (-)
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)
7. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H., (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012-2014)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 - Sekarang)

4. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

5. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf , Zakat, Infak, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah

6. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum

kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Penasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

5) Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya :

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KLS II A SUNGGUMINASA



B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten

Disebutkan dalam hadits berikut :

اتَّفَقَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقَّ فِي الْجِمَاعِ، فَيُثْبِتُ لَهَا الْحَيَاةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ
الْمَجْبُوبَ وَالْمَمْسُوحَ جَاهِلَةً بِهِمَا، وَيُضْرَبُ لِلْعَيْنِ سَنَةٌ أَجَلٌ لِاخْتِمَالِ زَوَالِ
مَا بِهِ.

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita punya hak dalam hal iimik. Karenanya, telah tetap baginya pilihan (antara pisah atau tidak), jika ia menikah dengan suami yang kehilangan pelir atau kemaluan dalam kondisi ia tak tahu (sebelumnya), dan bagi suami yang impoten diberi masa tenggang selama setahun, karena masih mungkin hal itu hilang.¹

Adapun seorang ulama Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata,

وَإِذَا وَجَدْتُهُ عَيْنِيًّا: أُجِّلَ إِلَى قَنَسٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَلَهَا الْفَسْخُ

Artinya:

Jika istri mendapati suaminya impoten, maka ditunda (diberi waktu kesempatan) satu tahun, jika telah berlalu dan suami masih impoten, maka istri berhak menuntut fasakh.²

Lemah syahwat sebagai alasan untuk melakukan perceraian dengan tegas diakui oleh Islam sebagaimana Rasulullah saw. Telah memberikan keputusan kepada

¹Drs. Muhammad Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Cet.I; Bandung: Kencana, 1997), h. 38.

²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001), h. 146.

pengadu yang datang kepada beliau untuk minta cerai dari suaminya di karenakan yang bersangkutan lemah syahwat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَزَّتْ جَا امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ لَا وَ دِينٍ ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : اِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas. ia berkata : Istri Tsabit bin Oais bin Svammas datang kepada Nabi saw.. lalu ia berkata. “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah saw. bertanya. “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab. “Ya”. Lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada Tsabit). “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. [HR. Bukhari dan Nasai].³

Adapun QS Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³Drs. Muhammad Thalib, 15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya, h. 51

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam jelas diatur alasan perceraian apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya maka Isteri dapat menggugat cerai karena pada dasarnya dalam hal perkawinan harus memberikan nafkah batin kepada suami atau Isteri, sebab dalam tujuan perkawinan itu untuk memperbanyak keturunan.⁵

Perceraian itu dapat terjadi pada pihak suami atau pihak Isteri apabila suami Isteri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi ia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, dan mampu mempertahankan rumah tangganya ia tidak mempunyai hak untuk bercerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.⁶

Cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut cerai menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat tentang hal cacat berupa impoten. Hal tersebut disepakati bisa dijadikan alasan menuntut perceraian karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak lagi mampu memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa potong kemaluan sama juga dengan impotensi, kecuali dalam dua masalah yaitu segera memfasakhkannya dan adanya keturunan memperoleh anak, dan hakim boleh memfasakhkan bila adanya tuntutan Isteri dengan syarat Isteri itu merdeka, baliqh, tidak mempunyai cacat

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 572

⁵Sitti Rusiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Maret 2016

⁶Ahmad Nur (46 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Marer 2016.

tertutup kemaluan daging dan tulang. Isteri tidak mengetahui keadaan suaminya seperti itu sebelum perkawinan dan Isteri tidak rela setelah mengetahuinya. Maka dari itu Isteri di perbolehkan menuntut fasakh kepada suaminya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim boleh memutuskan perkawinan yang suaminya impoten kalau Isteri yang menuntut memenuhi beberapa syarat tertentu seperti berikut :

- a. Isteri itu merdeka, kalau Isteri itu seorang budak, maka hak kebebasan menuntut fasakh pada tangan tuannya.
- b. Isteri itu baliqh, dengan arti kata bahwa apabila Isteri kecil tidak ada hak menuntut fasakh baginya.
- c. Isteri itu tidak mempunyai penyakit tertutup kemaluan dengan daging atau dengan tulang. Apabila Isteri mempunyai penyakit demikian, dia (Isteri) tidak boleh menuntut fasakh sebab terhalangnya bersenggama adalah disebabkan si Isteri itu sendiri.
- d. Isteri itu tidak mengetahui keadaan suaminya itu impoten sebelum perkawinan, jika di (Isteri) mengetahui dan diteruskan juga perkawinannya berarti dia (Isteri) rela dengan keadaan suaminya seperti itu, maka dia (Isteri) tidak ada hak untuk menuntut cerai.

Mazhab Maliki berpendapat yaitu bahwa boleh ditolak (boleh difasakhkan) dengan empat macam atau penyakit yaitu gila, sopak, kusta, dan penyakit yang terdapat pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan. Adakala kemaluan tertutup dengan tulang dan dengan daging pada wanita atau pada laki-laki

Dapat disimpulkan bahwa Maliki dan Asy'Syafi'i sependapat mengenai impoten ini yaitu satu macam cacat yang terdapat pada laki-laki (suami), maka perkawinan dapat diputuskan apabila Isteri menuntut.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Isteri memberi tangguh suaminya yang impoten itu selama satu tahun. Jika dia (suami) berhasil atau sembuh (tidak menjadi persoalan), tetapi jika tidak maka Isterinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai.

Yang memberikan hak kebebasan memilih kepada Isteri apakah mau bercerai atau tidak dan memutuskan perkawinan kalau dia (Isteri) adalah hakim.

Berdasarkan kutipan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut Asy-Syafi'i ini, apabila suami berpenyakit impoten Isterinya mempunyai hak menuntut putusnya perkawinan kepada hakim dan hakim boleh memutuskan perkawinan suami Isteri tersebut dengan melalui proses dan terbukti bahwa suami tersebut impoten. Salah syarat yang diberikan Asy-Syafi'i sebelum diputuskan perkawinan, si Isteri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suaminya itu akan sembuh.

Al-Imam Al-Qodhi 'Iyadh *rahimahullah* berkata,

اتَّفَقَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْجَمَاعِ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَجْبُوبَ وَالْمَمْسُوحَ جَاهِلَةً بِهِمَا، وَيُضْرَبُ لِلْعَيْنِ أَجَلُ سَنَةٍ لِاحْتِمَالِ زَوَالِ مَا بِهِ.

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita punya hak dalam hal jimak. Karenanya, telah tetap baginya pilihan (antara pisah dan tidak), jika ia menikah dengan suami yang kehilangan pelir atau kehilangan kemaluan dalam kondisi ia

tak tahu (sebelumnya); dan bagi suami yang impoten diberi masa tenggang selama setahun, karena masih mungkin hal itu hilang.⁷

Syaikh Abdullah bin Jibrin *rahimahullah* berkata, Alasannya (mengapa satu tahun) yaitu sampai berlalu empat musim karena bisa jadi ia tidak mampu melakukan jima' (lemah) karena pengaruh cuaca dingin. Jika dingin hilang maka datanglah kekuatan (jima' dan bisa tegak). Bisa jadi juga sebabnya adalah cuaca panas. Maka ditangguhkan setahun sampai berlalu empat musim. Jika telah berlalu tanpa perbaikan, maka Isteri berhak mengajukan permintaan cerai (faskh) kepada hakim. Karena wanita juga memiliki syahwat sebagaimana laki-laki.⁸

Sedangkan Menurut Imam Ahmad Hanbal, apabila suami impoten Isterinya berhak menuntut cerai kepada hakim dengan sendirinya hakim harus menyelesaikan perkaranya. Ahmad bin hanbal menambahkan penyakit yang boleh menuntut cerai ada delapan yaitu : gila, sopak, kusta, jab (terpotongnya zakar), impoten, ar-ritq (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan kesulitan bersenggama), al-qorm (benjolan yang tumbuh pada vagina), dan al-a'fal (daging yang tumbuh dan selalu mengeluarkan bau busuk).

Disamping itu mazhab ini mengungkapkan impoten termasuk salah satu aib yang terdapat pada suami dan impoten ini mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan dapat menimbulkan keresahan pada diri Isteri, oleh sebab itu impoten dapat dijadikan untuk meminta cerai.

a. Aib yang terdapat pada laki-laki dan wanita

⁷Pencinta Sunnah, *Solusi Isteri Saat Suami Impoten* (Blogger, 2015). <http://pencinta-sunnah.blogspot.co.id/2015/08/solusi-istri-saat-suami-impoten.html> (9 Agustus 2016).

⁸Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.

1. Junun (gila)
 2. Juzan (kusta/lepra)
 3. Baros (penyakit kulit/belang)
- b. Aib yang terdapat pada laki-laki
1. Al-Jub (terpotong zakar)
 2. Unnah (impoten)
- c. Aib yang terdapat pada wanita
1. Qorn (yang menghalangi atau mencegahnya Wath'i atau Jima')
 2. Rotak (vaginanya tertutup daging)
 3. Fatek (dempetnya saluran kencing dan vagina)
 4. Aflun (daging yang tumbuh sehingga mencegah nikmatnya berjima').⁹

Adapun Syaikh Athiyyah Shoqr Al-Mishriy *rahimahullah* berkata dalam kumpulan fatwa ulama Al-Azhar:

"Jika tampak bahwa pada suami ada aib yang menghalangi terjadinya kelahiran, misalnya: suami terputus dzakarnya atau ia impoten (ia tak mampu berjimak) karena kelemahan fisik, atau lansia –misalnya-, atau terputus pelirnya, maka si istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan demi meminta adanya pemisahan antara suami dan istri. Jika hal itu terbukti di sisi hakim dengan suatu metode diantara metode-metode pembuktian, maka suami diperintah untuk menalak istrinya. Jika ia tidak mentalaknya, maka suami diganti oleh hakim dalam sang istri

⁹Abu Yasid, Fikih Keluarga, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 68.

demikian mencegah madhorot yang akan menimpa istri. Talak ini merupakan talak ba'in shugro."

Inilah pendapat yang lurus dari para ulama berdasarkan atsar-atsar yang shohih dari para sahabat.

Jadi seorang wanita yang mendapatkan suami yang impoten, maka :

1. istri berhak meminta agar pernikahannya dibatalkan. Itulah fasakh (الفسخ).
2. Gugatan istri hendaknya diangkat ke pengadilan agar diputuskan urusan keduanya.
3. Namun sebelum fasakh ditetapkan, maka si suami diberi masa tenggang satu tahun.
4. Ketika tiba masa tenggangnya sudah habis, maka si suami harus menalak istrinya, atau hakim yang menggantikannya jika suami enggan.
5. Istri yang telah fasakh nikahnya, memiliki masa iddah selama 3 kali haid.
6. Jika ternyata suami sembuh dr penyakit impotensinya dlm masa tenggang, maka si istri tak berhak menggugat fasakh. Tapi boleh juga ia bertahan hidup bersamanya karena ada kemaslahatan yang menuntut kedua pihak.
7. Jika keduanya dipisah, sedang mereka sudah berhubungan badan, maka istri tetap mendapatkan maharnya. Jika belum, maka si wanita hanya berhak setengah dari maharnya.

Bila semua atau salah satu tersebut yang diatas ada pada salah satu pihak dan hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga maka salah satu pihak dapat memilih apakah meneruskan rumah tangga yang sudah berjalan atau memilih untuk berpisah.

Berdasarkan keempat pendapat beserta dalil-dalilnya, mazhab hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbal berpendapat bahwa berhak menuntut cerai kepada hakim apabila suaminya impoten karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu lagi memenuhi nafkah batin si Isteri baik maksud utama yaitu berketurunan. Mereka juga sependapat bahwa si suami di beri masa tangguh selama setahun, sesuai dengan yang dicontohkan khalifah Umar supaya selama masa tersebut suami dan Isteri itu dapat berusaha mengobatinya dengan harapan impotennya itu dapat disembuhkan. Diberikan kesempatan 1 tahun masa tangguhan agar dapat memberikan kemampuan bersetubuh.¹⁰

Dr. Wahbah az-zuhaili juga menjelaskan adapun jika laki-laki itu impoten maka laki-laki tersebut itu diberi waktu satu tahun semenjak perkaranya diangkat dipengadilan. Pertimbangannya karena cacat ini ada yang mungkin diobati.

C. Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya tentang putusnya perkawinan karena suami impoten, yaitu dalam pasal 38 dan pasal 39 berbunyi :

Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

¹⁰ Abdul A'ala Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 102.

Pasal 39 dengan rumusan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan Isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami Isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan :

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami Isteri.

- f. Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua ayat, yaitu :

- a. Suami melanggar *taklik thalaq*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada pasal 19 huruf (e) perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan-alasan. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami Isteri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut timbul sebelum perkawinan atau sesudahnya dan tidak menentukan jenis dan macam penyakit yang dapat dikategorikan pada cacat yang dapat menyebabkan Isteri berhak menuntut cerai, tetapi patokannya adalah “tidak dapat menjalankan kewajiban” serta sejauh mana suatu penyakit itu membahayakan Isteri, baik membahayakan fisiknya maupun penghidupannya dan sebagainya.¹¹

Hal ini didasari pada pasal 34 poin 3 yaitu: “jika suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Yang dimaksud “cacat” disini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama karena cacat tersebut tidak akan

¹¹Muhtaruddin Bahrum (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Maret 2016.

mencapai tujuan perkawinannya. kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhinya kebutuhan biologis.

Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sehingga bila hal itu terjadi dan salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidakharmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Impoten termasuk dalam penyakit dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama yang mengakibatkan hubungan suami Isteri tidak berjalan secara natural sehingga menyebabkan pihak lain merasa tersiksa dan tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.

Pasal 19 huruf (e) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami mempunyai cacat yang menghalangi terjadinya keharmonisan rumah tangga maka Isteri berhak menuntut cerai. Oleh karena itu apabila suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai rukun serta syaratnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya suaminya impoten secara otomatis akad nikahnya batal atau rusak.

Dalam kaitannya dengan perceraian salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Apabila suaminya menderita cacat impoten, maka harus diperiksa terlebih dahulu kedokter ahli. Memeriksa sebuah penyakit kepada dokter bertujuan agar hakim mendapatkan gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita si suami. Sehingga memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter tersebut hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika

menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan. Namun bila cacat atau penyakit bersifat temporer dan sifat temporeranya hanya jangka waktu yang tidak lama maka suami akan diberi tenggang waktu selama masa pengobatan dan pada saat itu si Isteri bersabar menunggu dan ikut serta berusaha menanggulangnya. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan thalaqnya karena hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan pertama terletak ditangan suami, disamping untuk mempersingkat prosedur. Apabila suami tidak mau atau tidak hadir, baru hakim boleh menyelesaikan perkaranya dengan bentuk perceraian dengan alasan karena keimpotenan suami itu mengakibatkan tujuan perkawinan, pergaulan suami Isteri, Isteri tidak mendapatkan nafkah batin, tidak tercapai yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi si Isteri.¹²

D. Duduk Perkara Tentang Impoten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
P U T U S A N
ALAUDDIN
Nomor 91/Pdt.G/2011/PA Sgm
M A K A S S A R
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

¹²Muhtaruddin Bahrum, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Pada tanggal 7 Maret 2016

SW binti MB umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

AR bin RN umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Dusun F, Desa G, Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Pebruari 2011, dengan register Nomor 91/ Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 16 Nopember 2006, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, dibawah register Nomor 40/40/I/2007 tertanggal 29 Januari 2007.

2. Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Dusun F, Desa G Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, dan penggugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua tergugat, dan sejak pertengahan bulan Desember 2006 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat menderita suatu penyakit yaitu tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami (impoten).
4. Bahwa penggugat dan orang tua tergugat sudah berusaha untuk membawa tergugat berobat baik secara medis maupun secara alternatif (tradisional) namun tidak ada hasil.
5. Bahwa pada bulan Desember 2006 setelah terjadi pertengkaran penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di I, Kabupaten Bulukumba selama satu hari, lalu keesokan harinya orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua penggugat. Dan tergugat berpesan kepada orang tuanya untuk disampaikan kepada orang tua penggugat, apabila penggugat mau kembali kepada tergugat maka tergugat akan lari ke Malaysia meninggalkan keluarganya, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya, dan tidak saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa, selama penggugat menikah dengan tergugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh tergugat, sehingga penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 10 Maret 2011 untuk sidang tanggal 16 Maret 2011 dan tanggal 25 Maret 2011 untuk sidang tanggal 13 April 2011 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa berhubung tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2007, tertanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. **Saksi-saksi di bawah sumpah**

Saksi kesatu, DA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di F Kelurahan H, Kecamatan G, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yaitu bersepupu tiga kali, sedangkan tergugat, saksi kenal setelah menikah dengan penggugat, tergugat bernama Tergugat (suami penggugat).
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, di Dusun Fg, Desa G, Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, selama satu

bulan, kemudian pisah tempat tinggal, karena tergugat menderita lemah syahwat (impoten) sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami mengenai nafkah lahir dan batin.

- Bahwa tergugat pernah berobat secara medis maupun alternatif, namun tidak ada tanda-tanda akan sembuh.
- Bahwa akibat dari hal tersebut, maka antara penggugat dan tergugat pada saat tinggal bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, pada bulan Desember 2006 penggugat pergi kerumah orang tuanya, kemudian keesokan harinya orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan tergugat berpesan agar disampaikan kepada orang tua penggugat bahwa jika penggugat mau kembali kepada tergugat, tergugat mau ke Malaysia meninggalkan keluarganya, sejak saat itu penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat, sudah kurang lebih lima tahun lamanya.
- Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat, tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh tergugat, yang menjamin kebutuhan hidup penggugat adalah orang tuanya sendiri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat lainnya pernah berusaha menasehati kedua belah pihak agar hidup bersama kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, EP, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Panciro, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keluarga Isteri saksi, sedangkan tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan penggugat, tergugat bernama Tergugat. Bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah ipar saksi bernama Abd. Rahman bin Rahim Dg. Nuru.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak pernah hidup bersama hanya satu bulan dan tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian berpisah tempat tinggal karena tidak pernah hidup rukun hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi disebabkan tergugat menderita lemah syahwat (impoten), sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami Isteri.
- Bahwa tergugat telah diantar oleh penggugat bersama dengan orang tua tergugat sendiri untuk berobat medis maupun alternatif, namun belum sembuh.
- Bahwa pada bulan Desember 2006, yaitu setelah terjadi pertengkaran penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan keesokan harinya orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan menyampaikan pesan tergugat bahwa apabila penggugat mau kembali kepada tergugat maka tergugat akan pergi ke Malaysia meninggalkan keluarganya, sejak itu kedua belah pihak berpisah tempat hingga sekarang sudah lima tahun lebih.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak tahan hidup menderita tanpa nafkah lahir maupun batin dari tegugat.
- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak wakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat suami tidak mampu melakukan hubungan suami Isteri (impoten) maka si Isteri memiliki hak untuk memutuskan perkawinannya sebagaimana dalil dari kitab sirojul wahaj hal 362 yang berbunyi:

أو وجدته عني أو مجنونا ثبت الخيار في فسخ النكاح

Artinya :

“Bilamana Isteri mendapati suaminya impoten atau gila maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak bercerai”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami Isteri sah, telah hidup bersama hanya satu bulan, namun tidak pernah rukun hanya pertengkaran saja yang selalu terjadi karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa tergugat menderita lemah syahwat (impoten), serta sejak setelah menikah hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah (biaya hidup) kepada penggugat, jadi yang membiayai kebutuhan hidup penggugat adalah orang tuanya.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2006 hingga sekarang, karena penggugat kembali kerumah orang tuanya, tidak tahan lagi hidup menderita lahir batin, meskipun tergugat telah berobat secara medis maupun alternatif, namun penyakit lemah syahwat tergugat belum juga sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan altenatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sehingga dengan demikian gugatan perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terhadap **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Nurwafiah Razak S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |

3. Biaya Panggilan	Rp.	215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah)**

***E. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten
Pada Pengadilan Agama Sungguminasa***

Bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan untuk menuntut cerai diantaranya:¹³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami Isteri.

¹³Sitti Rusiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Sungguminasa, 7 Maret 2016

- e. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2.
- f. Suami melanggar taklik talaq.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Bahwa alasan-alasan yang diketengahkan oleh pasal 19 Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang Isteri hanya mempunyai satu alasan diantara tujuh alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga ada pandangan hakim mengenai perceraian akibat suami impoten ini yaitu:¹⁴

1. Impoten tentunya menjadi perhatian bagi masyarakat karena sejak dini harus menjaga kesehatan anak-anaknya terkait dengan negara bangsa indonesia karena apabila tidak diperhatikan kesehatan seksualnya kedepannya akan berdampak besar pada negara karena negara yang sejahtera itu berawal dari keluarga yang baik.
2. Perlu adanya sosialisasi seksual sejak dini atau sejak kecil supaya tidak terjadi. Apalagi bila dikaitkan dengan perkembangan LGBT (Lesbian, gay

¹⁴Muhtaruddin Bahrum (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Maret 2016.

dan seterusnya), LGBT ini berawal dari lingkungan, impoten juga begitu karena impoten itu sebuah penyakit yang dibawah sejak kecil meskipun impoten itu bermacam-macam juga dari segi medis yaitu :

a. Disebabkan Akibat faktor fisik

Faktor fisik ini disebabkan adanya penyakit di dalam tubuh penderita. Penyakit ini biasanya berhubungan dengan peredaran aliran darah dalam tubuh.

Pengobatan impotensi mencakup pemeriksaan fisik secara menyeluruh, USG panggul, daerah selangkangan dan tes darah untuk memeriksa segala kemungkinan untuk mengetahui penyebabnya.

b. Disebabkan Akibat faktor psikologis

Faktor psikologis ini disebabkan oleh perasaan takut, depresi dan gangguan kecemasan, stres atau pasca gangguan stres traumatik, kekerasan psikologis atau trauma. Penyebab impotensi akibat faktor psikologis biasanya akan sembuh setelah gangguan psikis yang dialami teratasi.

Pada kasus khusus pengobatan impotensi akibat faktor psikologis melibatkan konseling dan terapi seksual oleh ahlinya. Dengan beberapa sesi terapi dan mungkin obat-obatan penenang penderita akan sembuh total.

c. Disebabkan Akibat faktor gaya hidup

Salah satu penyebab impotensi yang lain adalah faktor gaya hidup yang tidak sehat dan melawan hukum alam. Contoh paling sering adalah tidur tidak teratur dan kurang olah raga. Gaya hidup yang menjadi penyebab impotensi antara lain: merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan obat terlarang seperti steroid heroin, ganja, kokain dan anabolik tertentu. Obesitas ekstrim, kurangnya olah raga dan gaya hidup.

Perubahan positif pada gaya hidup tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anda secara keseluruhan tetapi dapat membantu anda mengatasi masalah impotensi.

d. Disebabkan Akibat obat-obatan

Obat-obatan tertentu yang dikonsumsi baik itu dengan resep dokter ataupun obat-obatan terlarang memiliki efek samping yang dapat menyebabkan impotensi. Berikut ini beberapa jenis obat-obatan penyebab impotensi yaitu: obat antidepresan, anti psikotik dan obat penenang, obat hipertensi atau tekanan darah tinggi, obat penahan nafsu makan, antihistamin, beta blocker yang digunakan untuk mengontrol angina dan tekanan darah tinggi.

Jika anda sedang dalam perawatan medis maka penting untuk mengetahui semua efek samping yang mungkin muncul akibat obat yang anda gunakan. Menghentikan penggunaan obat-obat penyebab impotensi kadang langsung menghilangkan gejala impotensi yang diderita.

Menyembuhkan impotensi disesuaikan dengan faktor penyebabnya, jika penyebabnya karena adanya penyakit maka penyakit tersebut harus disembuhkan terlebih dahulu.

Jika disebabkan karena faktor psikis maka sumber masalahnya perlu diselesaikan. Dan jika penyebabnya adalah karena gaya hidup tidak sehat maka perubahan gaya hidup akan membantu meningkatkan kualitas ereksi dan menyembuhkan impotensi.

Adapun pertimbangan hukum hakim pengadilan agama sungguminasa mengenai perceraian akibat suami impoten yaitu:¹⁵

1. Bahwa tergugat memang benar mengalami impoten.
2. Bahwa itu terungkap sebagai sebuah fakta dan majelis hakim juga memikirkan dampak negatifnya bagi rumah tangga
3. Bahwa penggugat mempunyai alasan-alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi I maupun saksi II mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di dusun F, Desa G, Kecamatan I, Kabupaten Bulukumba, selama satu bulan, kemudian berpisah tempat tinggal karena

¹⁵Muhtaruddin Bahrum (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Maret 2016.

tidak pernah hidup rukun hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi disebabkan tergugat menderita lemah syahwat (impoten) sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami mengenai nafkah lahir dan batin.

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa tergugat pernah diantar oleh penggugat bersama dengan orang tua tergugat sendiri untuk berobat secara medis maupun alternatif, namun tidak ada tanda-tanda akan sembuh.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa pada bulan Desember 2006 setelah terjadinya pertengkaran penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan keesokan harinya orang tua tergugat datang kerumah orang tua penggugat dan menyampaikan pesan tergugat bahwa apabila penggugat mau kembali kepada tergugat maka tergugat akan pergi kemalaysia meninggalkan keluarganya, sejak saat itu kedua belah pihak berpisah tempat dengan tergugat, sudah kurang lebih lima tahun lamanya.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat lainnya pernah berusaha menasehati kedua belah pihak agar hidup bersama kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui sejak pernikahan penggugat dengan tergugat hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang telah diajukan penggugat diatas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta- fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami Isteri sah, telah hidup bersama hanya satu bulan, namun tidak pernah rukun hanya pertengkaran saja

yang selalu terjadi karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah lahir maupun batin.

- Bahwa tergugat menderita lemah syahwat (impoten), serta sejak setelah menikah hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah (biaya hidup) kepada penggugat, jadi yang membiayai kebutuhan hidup penggugat adalah orang tuanya.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2006 hingga sekarang, karena penggugat kembali kerumah orang tuanya, tidak tahan lagi hidup menderita lahir batin, meskipun tergugat telah berobat secara medis maupun alternatif, namun penyakit lemah syahwat tergugat belum juga sembuh.

Pada bagian analisa akhir penulis mengambil satu kasus perceraian karena suami mengalami impoten karena berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian karena suami tidak bisa memberikan nafkah bathin (impoten).

Majelis hakim mengabulkan gugatan sebagaimana berikut:

Pertama, gugatan Isteri terhadap suaminya bukanlah semata-mata karena tidak bisa memberikan nafkah bathin, akan tetapi suami juga melakukan perilaku-perilaku negatif seperti tempramental sehingga menimbulkan percekcoan dan perselisihan berkepanjangan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI.

Kedua, tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek. Dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa apabila tergugatnya tidak hadir berarti secara hukum dia melepaskan haknya untuk membantah semua yang dikatakan oleh Isterinya, tergugat tidak hadir itu menjadi indikasi kuat bahwa tergugat sebenarnya mengakui itu terjadi, andaikata itu memang tidak benar tidak terjadi pasti suaminya datang membantah tapi suaminya tidak datang maka hakim menghukum dengan verstek.

Ketiga, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat serta dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan berdasarkan pasal 309 R.Bg.

Keempat, hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu Isteri “Pertama” berdasarkan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, bahwa berdasarkan fakta perselisihan pertengkaran dan adanya saling tidak mempedulikan serta ketidakmampuan tergugat untuk melakukan hubungan suami Isteri maka hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak. “Kedua” berdasarkan rujukan kitab sirojul wahaj yang menyatakan karena tergugat selaku suami tidak mampu melakukan hubungan suami Isteri (impoten) maka Isteri memiliki hak untuk memutuskan perkawinannya. Dan “Ketiga” pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan secara global bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap kasus perceraian karena suami impoten yakni mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak

bain sughra, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memperhatikan kepentingan pada pihak Isteri sebagai bagian dari keadilan dalam rumah tangga. karena pada dasarnya apabila perkawinan yang faktanya suami tidak bisa memberikan nafkah bathin maka akan terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan oleh Isteri. ¹⁶



¹⁶Ahmad Nur (46 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 7 Maret 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai register Nomor 91/Pdt.G/2011/PA.Sgm. untuk penulis ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut, yaitu :

1. Dalam perspektif hukum Islam perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah bathin (impoten) adalah suatu kebolehan (mubah) oleh syariat. Tidak ada fasakh dalam pernikahan karena ada aib akan tetapi dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang kepada isteri untuk memilih bercerai dengan suaminya yang tidak bisa memberikan nafkah bathin (impoten). Kebolehan tersebut berdasarkan atas pengkompromian atas nilai ataupun konsep kebolehan asalkan tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Sebagaimana hakim dalam putusannya merujuk pada kitab Sirojul Wahaj halaman 362, hal tersebut dibolehkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Menurut penulis putusan hakim pada kasus perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah bathin “impoten” substansinya adalah sejalan dengan maqasid syariah yaitu mewujudkan keadilan dalam rumah tangga.
2. Dalam konsep perceraian akibat suami impoten menurut Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai alasan-alasan

perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Keputusan Pengadilan Agama tidak menetapkan fasakh perkawinan melainkan telah terjadinya perceraian.

3. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI dan kitab Sirojul Wahajab hal 362. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah yang tiada lain memberikan putusan yang mencegah terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan oleh seorang isteri.

B. Implikasi Penelitian

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Perlu sosialisai melalui media cetak, seminar-seminar ataupun majlis ta'lim terhadap pembahasan diatas supaya masyarakat dapat memahami pentingnya sebuah keluarga dan kepada para isteri yang menemui kasus seperti diatas, janganlah terlalu cepat menuntut cerai tetapi cobalah bermusyawarah terlebih

dahulu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan kepada para isteri yang belum atau tidak menemuinya harus berhati-hati supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi pemuda dan pemudi yang hendak menikah untuk lebih mempelajari makna mendalam dari tujuan perkawinan sehingga lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
3. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Abu Achmad, Cholid Norbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Ali, H Mohammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam, di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Qur'an dan Hadits

Aroeng, Sabri Samin dan Andi Nurmaya. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.

Asrori, Anang Zamroni dan Ma'ruf. *Bimbingan Seks Islam*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.

As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Minhajus Salikin wa Taudhihu Fiqhid Dien*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ghoffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Almahira, 2006.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Maududi, Abdul A'ala. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Rekap Perkara diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kamis, 7 Januari 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 1998.

- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Majmu Al Fatawa Ibnu taimiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Thalib, Muhammad. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. Bandung: Kencana, 1997.
- Tjitrosudibio, Subekti Dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Yasid, Abu. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 0 9 9 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : **969/S.01.P/P2T/02/2016**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
Sungguminasa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari Nomor : SI.1/PP.00.9/850/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SYAMSIDAR**
Nomor Pokok : **10100112020**
Program Studi : **Peradilan Agama**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLS IB SUNGGUMINASA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 17 Februari s/d 17 Maret 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **18 Februari 2016**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE. MS.
Pangkat : **Pembina Utama Madya**
Nip : **19610513 199002 1 002**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhtaruddin Bahrum, S.HI. M.H

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Syamsidar

NIM : 101001120120

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama

Alamat : Samata

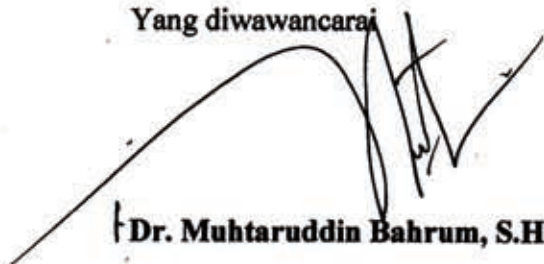
Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat suami Impoten”**.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 7 Maret 2016

Yang diwawancarai



Dr. Muhtaruddin Bahrum, S.HI. M.H

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Syamsidar

NIM : 101001120120

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama

Alamat : Samata

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat suami Impoten"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 7 Maret 2016

Yang diwawancarai



Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Nur, M.H.
Alamat : PT. Cv. Dewi
Pekerjaan : Hakim (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa)

Menerangkan bahwa

Nama : Syamsidar
NIM : 101001120120
Pekerjaan : Mahasiswa
PerguruanTinggi : Strata Satu (S1) Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama
Alamat : Samata

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat suami Impoten"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 7 Maret 2016

Yang diwawancarai



Drs. Ahmad Nur, M.H.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 306 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Syamsidar
N I M : 10100112020
Jurusan : Peradilan Agama
Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag
Penguji I : Dr. Muh. Sabri AR. M.Ag
Penguji II : Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag
Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah
2. Nurjannah
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 21 April 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 58 Tahun 2016

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI

TAHUN 2016

- Menimbang** :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. H. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
: 2. Dr. Zulfahmi, S.Ag., M.Ag., Ph.D

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Syamsidar


NIM : 10100112020

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama

Prodi : Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT
SUAMI IMPOTEN (Studi Kasus di Pengadilan Agama
KLS IB Sungguminasa)

- Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 29-01-2016
Dekan

Prof. Dr. Darusalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.

2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 061 Tahun 2016

Nama : Syamsidar

Nim : 10100112020

Jurusan : Peradilan Agama

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Kasus di
Pengadilan Agama KLS IB Sungguminasa)

Samata, 17 Februari 2016

Penyusun Skripsi



Syamsidar

Nim : 10100112020

Pembimbing I

Pembimbing II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110201997031002



Dr. Zulfahmi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
NIP. 196706111996031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Peradilan Agama



Dr. Supardin, M.HI.

NIP. 196503021994031003



Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SL.1/PP.00.9/50/2016

Gowa, 15 Februari 2016

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada:

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

Di

Makassar

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Syamsidar
Nim	: 10100112020
Fakultas/jurusan	: Syariah dan Hukum/ Peradilan Agama
Semester	: (VIII) Delapan
Alamat	: Jl. Samata Gowa.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Kasus di Pengadilan Agama
KLS IB Sungguminasa)”**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.**
2. Dr. Zulfahmi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kls IB Sungguminasa, terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 s.d 22 Maret 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



**A.n. Rektor,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,**

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Syamsidar, NIM: 10100112020, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi berjudul: "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 30 Maret 2016.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19711020 199703 1 002


Zulfahmi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
NIP. 19670611 199603 1 001


Mengetahui.
Ketua Jurusan Peradilan Agama

Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 19650302 199403 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusun skripsi Saudari Syamsidar, NIM: 10100112020, Mahasiswi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

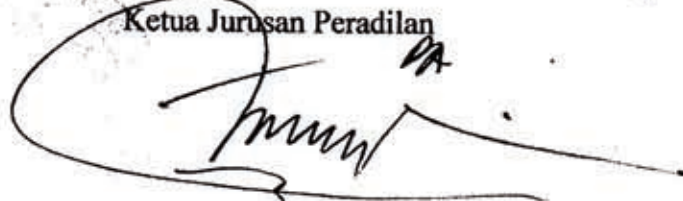
Makassar, 11 Agustus 2016

Penguji I : Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.
Penguji II : Andi Intan Cahyani, S.Ag. M.Ag
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Pembimbing II : Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D.

()
()
()
()

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.

NIP. 196503021994031003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 417 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Syamsidar
N I M : 10100112020
Jurusan : Peradilan Agama
Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Prihal : Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
Penguji I : Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag
Penguji II : Andi Intan Cahyani, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah
2. St. Warsidah, S.Ag

- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Agustus 2016

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JL. MASJID RAYA NO. TELP. (0411) 864298 FAX (0411) 864299
SUNGGUMINASA 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/605 /BP.02/III/2016

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Syamsidar
No.Pokok : 10100112020
Program Studi : Pengadilan Agama
Alamat : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Gowa

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian Individual dengan judul :

“ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa) ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Sungguminasa, 17 Maret 2016
Ketua,

/ Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H /
Nip. 19670703 199303 2 006

Nomor : SL.1/PP.00.9/417 /2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 24 Agustus 2016

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (Sekertaris)
3. Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag (Penguji I)
4. Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag (Penguji II)
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (Pembimbing I)
6. Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Syamsidar
NIM : 10100112020
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Buka Sidang : 08.30
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- GowaTlp. (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : S1. 1/PP.00.9/1977/2016
Lamp. : 1 (satu) Proposal
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

Samata, 04 Februari 2016

Saudari Syamsidar

Kepada Yang Terhormat

1. Dr. H. Halim Talli, S.Ag., M.Ag.

(Pembimbing I)

2. Dr. Zulfahmi, S.Ag., M.Ag., Ph.D

(Pembimbing II)

Di

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan seminar proposal, maka kami mengundang untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak sebagai pembimbing pada seminar draft skripsi tersebut, insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 10 Februari 2016

Waktu : Jam 09.00

Tempat : Lab. Bank Mini Lt. 4

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI
IMPOTEN (Studi Kasus di Pengadilan Agama KLS IB
Sungguminasa)

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Koran Jurusan Peradilan Agama

Dr. Supardin, M.Hi.

NIP. 19650302 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar

RIWAYAT HIDUP



SYAMSIDAR. Dilahirkan di Bontobila pada tanggal 13 Juni 1994. Penulis merupakan anak ke 1 (Pertama) dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda Maliang dan Ibunda Sattuma. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Paku Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Biring Balang dan tamat pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Limbung Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2012. Di tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di tahun 2016. Keinginan dan harapan terbesarnya yaitu dapat membahagiakan kedua orang tuanya serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ia juga berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat berguna bagi bangsa dan Negara. Adapun kalimat yang selalu memotivasi penulis dalam setiap langkahnya, yaitu “ **MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN** (QS. Asy-Syarh: 5). Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R